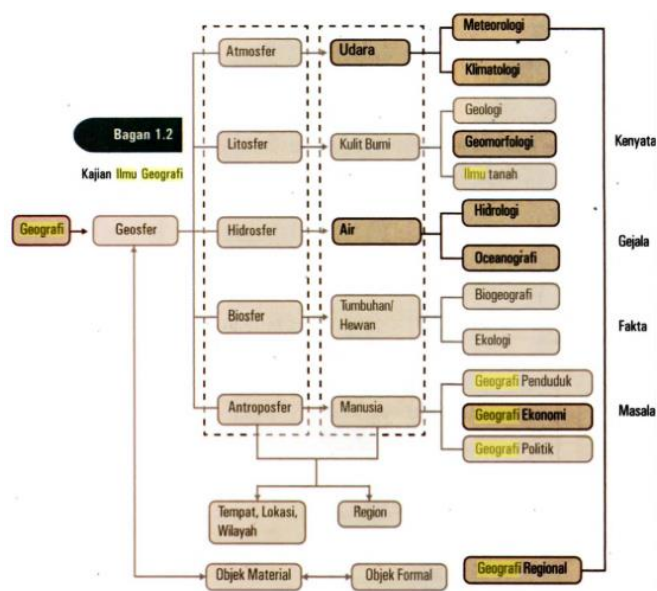


BAB II TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Geografi Manusia

Geografi manusia adalah salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari aspek fenomena keruangan di permukaan bumi dimana manusia menjadi objek kajian utamanya. Gejala manusia yang menjadi objek diantaranya: aspek demografi yang meliputi kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan sosial, dan kegiatan budayanya (Riantika & Hastuti, 2019). Konsep geografi manusia tidak dapat dipisahkan dari konsep geografi secara umum. Geografi dimaknai sebagai studi tentang hubungan antar manusia, tempat, lingkungan serta bagaimana variasi mereka secara spasial dan temporal di dan antara tempat. Geografi manusia berfokus pada organisasi spasial dan proses yang membentuk kehidupan dan aktivitas manusia serta interaksinya dengan tempat dan alam (Sukamdi et al., 2020).



Sumber: (Yani Ahmad, 2007)

Gambar 2. 1
Cabang Ilmu Geografi

Dapat dilihat pada Gambar 2.1 bahwa cabang geografi manusia terdiri dari sejumlah sub-disiplin ilmu yang berfokus pada berbagai elemen kegiatan dan organisasi manusia, misalnya geografi budaya, geografi sejarah, geografi politik, geografi penduduk, geografi pedesaan, geografi sosial, geografi transportasi, dan geografi perkotaan. Adapun perbedaan antara geografi manusia dengan disiplin ilmu lainnya adalah pada penerapan konsep inti geografi pada fenomena yang diteliti, seperti ruang, tempat, skala, lanskap, mobilitas, dan alam.

Konsep tersebut yang menjadikan landasan berpikir bahwa fenomena yang dipelajari oleh geografi manusia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan dimensi spasial dan temporal. Selain itu, setiap fenomena menggambarkan proses yang berlangsung secara integral dengan fenomena lainnya dan tidak bersifat independen. Jika geografi fisik berkonsentrasi pada proses spasial dan lingkungan yang membentuk lingkungan alam/fisik, maka geografi manusia berkonsentrasi pada organisasi spasial dan proses yang membentuk kehidupan, aktivitas manusia, dan interaksi mereka dengan lingkungannya (Sukamdi et al., 2020).

Fouberrg menyebutkan bahwa geografi manusia adalah studi mengenai fenomena manusia di bumi. Dalam konteks ini, geografi manusia berfokus pada 4 aspek yaitu, (a) *how people make places*, (b) *how we organize space and society*, (c) *how we interact with each other in places and across space*, (d) *how we make sense of others and ourselves in our localities, region and the world* (Sukamdi et al., 2020).

Geografi manusia berperan dalam distribusi kekayaan, penggunaan sumber daya ekonomi, dan perbaikan lingkungan dan pengaruhnya. Gerakan untuk perbaikan masyarakat dan lingkungan menunjukkan tanggung jawab masyarakat untuk menghindari, mencegah atau mengatasi masalah yang mereka hadapi. Demikian pula integrasi perencanaan dan pembangunan nasional dan daerah (Zain et al., 2022).

1) Geografi Sosial

Geografi sosial adalah salah satu kajian dalam geografi manusia yang menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya yaitu orang lain dan kelompok manusia di sekitarnya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder pasti akan memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Geografi sosial membahas mengenai gejala dan permasalahan sosial, proses interaksi manusia dengan lingkungan, perubahan sosial yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan teknologi, dan perubahan sosial yang disebabkan oleh perubahan struktur masyarakat (Effendi, 2020).

Geografi sosial erat kaitannya dengan Geografi Manusia yang diajarkan di mazhab Prancis pada awal abad-20. Paul Vidal De Lablace menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam. Menurut Paul Vidal De Lablace dan pengikutnya “Kepribadian daerah itu merupakan hasil cara masyarakat mengeksploitasi sumber daya alam dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap lingkungannya, serta bagaimana manusia mengorganisasi dirinya sendiri” (Daldjoeni, 2017).

Pendekatan geografis terletak pada perjuangan hidup setiap manusia yang selalu terhubung dengan tempat atau wilayah tertentu di permukaan bumi. Wilayah atau tempat tersebut pada dirinya mengandung sifat-sifat material yang diberikan oleh alam dan yang penting adalah bagaimana kondisi alam ini terus mempengaruhi perjuangan hidup manusia. (Daldjoeni, 2017).

2.1.2 Perencanaan Wilayah

Perencanaan merupakan unsur penting yang sangat menentukan dalam proses kerja. Berbagai permasalahan pembangunan saat ini muncul karena terdapat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sektoral. Sehingga, berbagai upaya dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara

terintegrasi antar sektor maupun antar wilayah. Perencanaan wilayah selalu menyangkut tiga jenis aspek kehidupan diantaranya, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, dan aspek fisik. Oleh karena itu setiap perencanaan wilayah pada skala wilayah yang berbeda selalu terkait dengan ketiga aspek tersebut. Dalam skala yang lebih luas, ketiga aspek tersebut sulit dipisahkan karena saling berkaitan (Sutaryono et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dalam perencanaan pembangunan wilayah adalah berdasarkan atas perhitungan sumberdaya yang tersedia. Keterbatasan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam upaya pembangunan menuntut adanya prioritas pembangunan dengan memperhatikan keunggulan wilayah (Undang-Undang Nomor: 25, Tahun 2004, 2004).

Perencanaan wilayah mengacu pada penetapan tahapan-tahapan pembangunan yang akan dilakukan di suatu wilayah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut meliputi perencanaan tujuan pembangunan, mengantisipasi apa yang akan terjadi di daerah pada masa yang akan datang, memperkirakan masalah yang mungkin timbul selama dalam proses pembangunan, dan menentukan lokasi atau wilayah yang tepat untuk dijadikan tempat melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan (Lubis, 2021).

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam suatu pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan merupakan hal yang terkait dengan aspek ruang dan waktu. Keterkaitan waktu dapat dilihat dari jadwal perencanaan, kesinambungan dan jangka waktu rencana baik pendek, menengah, panjang. Dalam melakukan pembangunan terdapat tiga pendekatan utama yaitu pembangunan makro, pembangunan sektor dan regional. Dalam rangka merencanakan penataan wilayah dibutuhkan

perencanaan spasial. Salah satu perencanaan spasial adalah perencanaan wilayah yang mencakup aspek ruang dan mempertajam fokus daerah pembangunan dalam kota atau provinsi. Perencanaan wilayah dapat tercermin salah satunya dari perencanaan tata ruang sebagai wujud struktur dan polar uang lingkungan fisik yang berkaitan dengan masyarakat (Aulia et al., 2019).

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

1) Pengertian Partisipasi

Istilah partisipasi diambil dari bahasa Inggris *participation* yang berarti ikut serta, peran serta, ambil bagian, dan terlibat. Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu atau kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang dilandasi oleh kesadaran warga, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa paksaan oleh pihak-pihak tertentu (Tawai & Yusuf, 2017).

Menurut *United Nations*, partisipasi digambarkan sebagai penciptaan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memberikan sumbangannya bagi pembangunan, mempengaruhi proses pembangunan itu dan turut menikmati hasilnya. Partisipasi masyarakat merupakan dukungan terhadap proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Partisipasi masyarakat ini juga merupakan kerja sama antara perencana (pemerintah) dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Adapun ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dapat dilihat dari besarnya peran dan wewenang masyarakat dalam menentukan, menyediakan, mengaudit dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun (Kogoya et al., 2015). Keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau program disebut partisipasi apabila orang tersebut ambil bagian dalam kegiatan atau program tersebut. Jika

keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau program tidak disertai dengan ambil bagian maka tidak disebut sebagai partisipasi (Amirin, 2005).

Prasyarat yang bisa membangkitkan tenaga sosial diperlukan guna menumbuhkan dan menerapkan semangat partisipasi masyarakat. Pasaribu dalam (Tawai & Yusuf, 2017) mengemukakan sebagai berikut: (1) Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan keterikatan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi; (2) Keterkaitan tujuan hidup, keterkaitan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk partisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, apabila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan; (3) Kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi; (4) Adanya orang yang memprakarsai perubahan merupakan prasyarat lahirnya partisipasi; dan (5) iklim partisipasi, partisipasi bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada maka akan sangat mudah tumbuh.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi dalam pekerjaan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dengan demikian mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat-pemerintah untuk mensukseskan program yang akan dilaksanakan (Tawai & Yusuf, 2017).

Partisipasi masyarakat sering digunakan di negara maju sebagai pendekatan yang efektif untuk implementasi program dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan proyek publik dan tata kelola (Enserink dan Koppenjan 2007). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diperlukan pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Keberhasilan suatu program tidak hanya didasarkan pada kemampuan pemerintah, tetapi juga tergantung pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan (Makhmudi & Muktiali, 2018).

Conyers dalam (Kaehe et al., 2019) mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan atau sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Pembangunan akan mempercayai proyek atau program pembangunan mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek.
- c. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjelaskan pada tahapan perencanaan pembangunan diawali proses penyusunan rencana yang berbunyi: melibatkan masyarakat (*stakeholders*) yang menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Kaehe et al., 2019).

2) Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa kontribusi masyarakat dalam keikutsertaan. Wujud kontribusi masyarakat tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program. Karena, wujud keterlibatan mereka akan berbeda-beda setiap tahapan. Sebagai contoh, dalam tahap pengambilan perencanaan dan pengambilan keputusan berupa sumbangan pikiran seperti saran maupun penolakan. Dalam partisipasi pelaksanaan dapat dilihat dari partisipasi langsung maupun

tidak langsung. Partisipasi langsung dapat berupa sumbangan tenaga dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan, partisipasi tidak langsung bantuan berupa swadaya masyarakat (memberikan makanan/minuman) (Tawai Andrian, 2017).

Adapun bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam (Simarmata et al., 2021), yaitu:

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan ataupun penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dapat dilihat melalui menggerakkan sumberdaya keuangan, kegiatan administrasi, koordinasi serta penjabaran program. Pelaksanaan suatu program merupakan faktor yang menentukan keberhasilan program itu sendiri. Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan terbagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Tenaga

Partisipasi dalam bentuk tenaga merupakan partisipasi dalam melakukan usaha-usaha yang dapat mendukung keberhasilan program. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi secara aktif, hal ini dikarenakan masyarakat lebih memilih

mengerjakan kegiatan sendiri dibandingkan harus memberikan pekerjaan kegiatan tersebut pada pihak luar.

2. Swadaya Masyarakat

Bentuk ini merupakan partisipasi yang dilakukan masyarakat berupa pemberian makanan/minuman penunjang kegiatan kepada masyarakat dan tukang bangunan yang mengerjakan pembangunan.

3. Harta benda dan barang material

Partisipasi dalam bentuk harta benda yaitu dengan menyumbangkan harta benda milik pribadi, biasanya berupa alat kerja atau perkakas.

c. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat hasil ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Secara kualitas, keberhasilan suatu program ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari aspek kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Cohen dan Uphoff, juga menambahkan bahwa partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga aspek yaitu aspek manfaat materialnya (*material benefits*), manfaat sosialnya (*social benefits*), dan manfaat pribadi (*personal benefits*).

d. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi

Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam tahap evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara keseluruhan. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau apakah ada penyimpangan. Partisipasi masyarakat dalam hal ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah dicapai, dapat dilihat sebagai indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat

terhadap infrastruktur yang sudah dihasilkan. Maka dari itu, mudah diperkirakan hal tersebut dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut (Astuti, 2011: 50 dalam Uceng et al., 2019) bentuk partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Hal tersebut bertujuan agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- c. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- d. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi *representative* dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan kepada wakilnya.

Bentuk-bentuk partisipasi ini dalam kegiatan pelaksanaannya tentunya memerlukan prasyarat, salah satunya

adalah unsur kesukarelaan dalam melakukan peran serta tersebut, karena dalam melakukan peran serta atau partisipasi berarti melakukan keterlibatan terhadap suatu masalah yang memerlukan peran serta berbagai kalangan di sekelilingnya untuk dapat mencapai tujuan.

3) Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat program seperti misalnya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan.

Hanif dalam (Uceng et al., 2019) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu:

a) Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung yang lebih banyak berpartisipasi.

b) Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur”, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d) Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e) Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi diantaranya yaitu:

1. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil dari tahu dan pengalaman seseorang yang terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia yaitu: melihat, mendengar, penciuman, merasa, dan meraba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga (Darsin et al., 2019). Sedangkan kesadaran masyarakat merupakan keadaan tahu, ingat, dan rasa atas suatu kondisi yang ada di sekitar. Kondisi di mana masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan, karena mengetahui atau sadar akan keadaan lingkungan akan menggerakkan diri mereka untuk turut berpartisipasi (Hastjarjo, 2005).

2. Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dapat diartikan sebagai sebuah kapasitas dari seorang individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam

pekerjaan tertentu. Menurut (Robbins, dalam Latifah, 2018) mendefinisikan kemampuan seorang individu hakekatnya tersusun atas kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, stamina, kekuatan, kecekatan, dan keterampilan serupa. Sedangkan keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, dan cekatan. Iverson dalam (Nidyawati, 2022) menjelaskan bahwa keterampilan membutuhkan pelatihan dan kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang agar dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. Masyarakat yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan lebih mudah ikut serta berpartisipasi.

3. Peran dan Komunikasi Pemerintah

Ditinjau pada konteks pemerintahan, pemerintah harus mampu berkorelasi dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan yaitu masyarakat. Adapun tinjauan peran pemerintah terhadap masyarakat dilihat dari kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemerintah dapat menggunakan konsep musyawarah dalam mencapai suatu tujuan bersama (Nurrahman, 2020).

Komunikasi dalam pembangunan juga disesuaikan dengan fungsi serta tujuan yang diinginkan. Adapun fungsi yang berkaitan dengan tujuan tersebut melibatkan pertukaran informasi yang diperlukan. Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat maka pembangunan yang direncanakan bersama akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Zahara, 2018). Komunikasi dan peran pemerintah sangat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Karena, ketika komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat baik tanpa adanya kesalahpahaman dalam penyampaian maka masyarakat juga pasti tergerak untuk ikut serta.

4. Keterbukaan dan Transparansi Pemerintah

Keterbukaan dari pemerintah pada setiap penyelenggaraan pembangunan akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, dengan terbukanya informasi dapat mengurangi dan menghilangkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan instansi yang bersangkutan. Selain itu dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan program karena semua informasi sudah terbuka dan transparan. Selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi dari segi biaya maupun waktu dalam pelaksanaannya. Secara eksternal keterbukaan dan transparansi ini akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjamin kepastian layanan publik bagi masyarakat (Ricky & Rahmatullah, 2023).

Transparansi mengutamakan segala keputusan yang diambil dan dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi dapat diakses dengan mudah. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas (Ricky & Rahmatullah, 2023).

5. Ketersediaan Sumber dana

Ketersediaan sumberdaya dana juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena pada umumnya masyarakat akan tergerak untuk ikut serta jika memang terdapat aliran dana. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila kegiatannya melibatkan anggota masyarakat (Kamila et al., 2020).

2.1.4 Penataan Lingkungan

Ruang merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri dari bumi, air, dan angkasa yang merupakan wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka kelangsungan hidup. Ruang di sini mengandung pengertian berdimensi tiga dan dengan kemajuan teknologi bahkan berdimensi banyak (multi dimensi) dan penamaannya disamping mempertimbangkan aspek kesenian dan

kemampuan, juga mempertimbangkan keterkaitan fungsi antar fungsi lingkungan dan pembangunan. Tata ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang suatu wilayah baik dengan direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang serta menyasikan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna angkasa serta tata dumber daya lainnya (Taryono, 2016).

Penataan lingkungan mencakup struktur dan keterkaitan lingkungan yang merupakan suatu kesatuan dalam mekanisme pembangunan. Keterkaitan antar pengembangan wilayah atau daerah dan pembinaan lingkungan hidup sangatlah erat dalam perwujudan, penyeimbangan, pertumbuhan antar wilayah atau daerah maju dan terbelakang atau terisolir agar dapat meningkat kualitas lingkungan hidup. Penataan lingkungan merupakan upaya perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana secara terpadu dan dinamik dalam memenuhi penggunaan ruang terus meningkat dari waktu ke waktu (Taryono, 2016).

2.1.5 Permukiman Kumuh

1) Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni, karena memiliki kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitasnya tidak memenuhi standar, dan dibangun tidak beraturan. Selain itu kondisi sarana dan prasarana lingkungan juga tidak memenuhi persyaratan. Pada permukiman kumuh, jumlah penduduknya sangat banyak, rumah-rumahnya sangat padat dan tidak teratur, serta kondisi sosial ekonomi penduduknya sangat rendah. Akibatnya, sarana dan prasarana lingkungan yang tersedia tempat cenderung tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan (Musri, 2020).

Kawasan permukiman kumuh seringkali identik dengan keberadaan penduduk miskin. Tetapi persepsi ini tidak selalu benar karena di kawasan permukiman kumuh juga terdapat penduduk yang tidak termasuk kategori miskin. Dua hal yang mencirikan kawasan tersebut masuk ke dalam kategori kumuh 1) Kawasan tersebut kurang

terlayani oleh infrastruktur pendukung seperti jalan, *drainase*, saluran limbah, dan lain-lain sehingga mengalami degradasi. 2) Hunian di kawasan tersebut secara kasat mata terlihat tidak layak huni dilihat pada kurangnya ventilasi maupun pencahayaan, dan mutu material bangunannya tidak layak dijadikan sebagai bahan bangunan untuk sebuah hunian (Wijaya, 2016).

Menurut (Kuswanto, 2005 dalam (Fadjarajani & Maharani, 2015) permukiman kumuh dapat diartikan menjadi dua yaitu kawasan yang terbentuk karena keterbatasan kota dalam mengadaptasi perkembangan perkotaan sedemikian rupa sehingga menimbulkan persaingan dalam penggunaan lahan perkotaan. Kedua, kawasan yang letaknya secara geografis terdesak oleh perkembangan kota yang awalnya baik namun lambat laun berubah menjadi kumuh. Perkembangan kota kumuh ini disebabkan oleh mobilitas sosial dan kondisi ekonomi yang stagnan.

2) Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 (*Permen PUPR*, 2018) permukiman kumuh terjadi karena pengurangan tingkat kualitas untuk dijadikan tempat tinggal. Selain itu, letak antar bangunan rumahnya tidak rapi, kerapatan antar bangunan, kualitas lingkungan, serta kurangnya fasilitas pendukung.

Menurut peraturan di atas, permukiman kumuh memiliki karakteristik yaitu:

1. Gedung serta bangunan tidak teratur, terlalu padat, kualitas bangunan rendah.
2. Belum terlayani akses jalan ke seluruh permukiman serta buruknya permukaan jalan.
3. Tidak tersedia air bersih yang aman serta belum terpenuhinya kebutuhan air minum.

4. Limpasan air tidak bisa mengalir dengan baik sehingga saat hujan menyebabkan munculnya genangan, tidak tersedia saluran air, *drainase* tidak saling terhubung, *drainase* tidak terpelihara, *drainase* memiliki kualitas yang rendah.
5. Pengolahan air limbah belum memenuhi kriteria syarat dan standar, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan air limbah.
6. Sistem pengolahan sampah tidak memenuhi standar.
7. Tidak tersedianya proteksi kebakaran.
8. Ketersediaan ruang terbuka hijau kurang

3) Faktor Terbentuknya Permukiman Kumuh

Berdasarkan (Musri, 2020) faktor terbentuknya permukiman kumuh dapat dikelompokkan menjadi:

1. Faktor internal terdiri dari:
 - a. Faktor budaya
 - b. Agama
 - c. Tempat bekerja
 - d. Tempat lahir
 - e. Lama tinggal
 - f. Investasi rumah
 - g. Jenis bangunan rumah
2. Faktor eksternal terdiri dari:
 - a. Kepemilikan tanah
 - b. Kebijakan pemerintah

Suatu wilayah dapat dikatakan kumuh dengan menghitung setiap indikator, sub kriteria hingga kelas klasifikasi untuk tingkat kekumuhan. Klasifikasi untuk *scoring* tingkat kekumuhan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Klasifikasi *Scoring* Tingkat Kekumuhan

Jenis	Skor
Bukan Kawasan Kumuh	0 – 8,75
Kawasan Kumuh Ringan	8,76 -17,50
Kawasan Kumuh Sedang	17,51 – 26,25
Kawasan Kumuh Berat	26,26 -35

(Crysta, 2017)

2.1.6 Program Penataan Lingkungan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

1) Pengertian Program Kota Tanpa Kumuh

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program dalam penanganan kawasan kumuh baik di desa maupun di kota dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan upaya strategis Ditjen Cipta Karya PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan *platform* kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (Sitorus et al., 2020).

Program Kotaku mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni. Program ini meliputi perbaikan infrastruktur yang dianggap tidak layak berdasarkan 7 parameter kumuh, yaitu dilihat dari kondisi bangunan gedung, indikator jalan lingkungan, penyediaan air minum, *drainase*, pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Jika dalam suatu wilayah terdapat salah satu indikator tersebut maka program Kotaku akan memperbaiki melalui program yang dibutuhkan (Sitorus et al., 2020).

2) Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh

“Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang akan dicapai melalui program Kotaku. Sehingga dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kelurahan/Desa. Program ini dijabarkan dalam kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman-permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan ini mempertemukan perencanaan makro (*top-down*) dengan perencanaan mikro (*bottom-up*) (Farida, 2018).

Adapun tujuan umum program ini dalam meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan diatas dilakukan kegiatan:

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan.
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh dalam program Kotaku tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, tetapi juga mencegah tumbuhnya permukiman kumuh baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam program Kotaku didasarkan pada kondisi kualitas permukiman yang ada. Dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan (Andiyan et al., 2021).

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Adapun capaian Kementerian PUPR dalam pengentasan kawasan kumuh di Indonesia selama periode tahun 2020-2022 mencapai 7.257 hektar.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Tabel 2. 2
Penelitian Yang Relevan

No	Aspek	Penelitian yang Relevan			Penelitian yang di Lakukan
		Nurul Hayati (2020)	Dewi Syintia Simarmata, dkk (2021)	Fitriana (2022)	Windi Saputri Prastini (2023)
1.	Judul	Penataan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya	Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Analisis Bentuk dan Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang	Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Pada Kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
2.	Rumusan Masalah	1. Bagaimana penataan permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di	Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di	Bagaimana bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh khususnya di	1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir

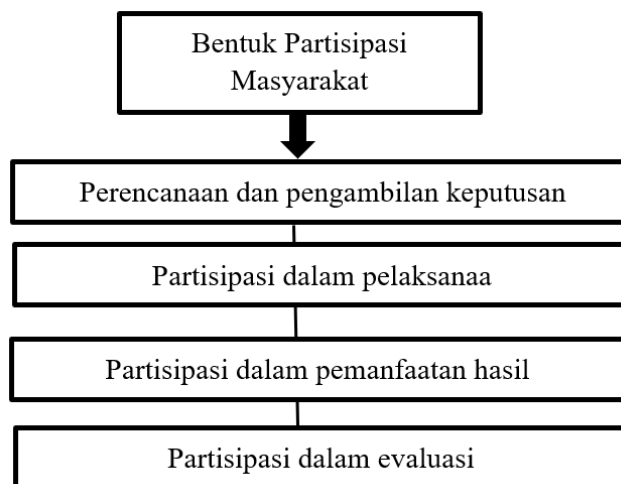
No	Aspek	Penelitian yang Relevan			Penelitian yang di Lakukan
		Nurul Hayati (2020)	Dewi Syintia Simarmata, dkk (2021)	Fitriana (2022)	Windi Saputri Prastini (2023)
		<p>Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?</p> <p>2. Bagaimana karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya?</p>	<p>Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung?</p>	<p>lokasi deliniasi kumuh Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang?</p>	<p>(Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?</p> <p>2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?</p>

Sumber: Hasil Studi Pustaka, 2023

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model (konseptual) tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menjelaskan secara teoretis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Sehingga, setiap penyusunan paradigma harus didasarkan pada kerangka konseptual (Ahyar et al., 2020). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah serta tujuan penelitian ini dengan didukung kajian teoretis dan tinjauan dari penelitian yang relevan maka secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu:

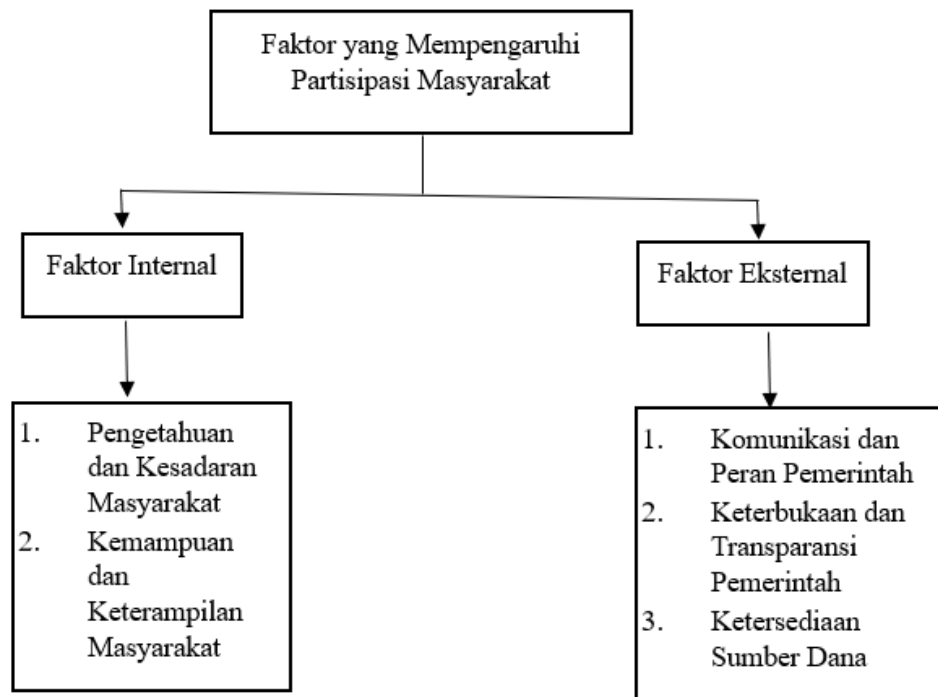
1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan kumuh Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program.
Variabel: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat dalam evaluasi.



Gambar 2. 2
Kerangka Konseptual 1

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kotaku.
Variabel: Faktor internal: Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kemampuan dan keterampilan masyarakat.

Faktor eksternal: Peran pemerintah, keterbukaan dan transparansi pemerintah, serta ketersediaan sumberdaya dan dana.



Gambar 2. 3
Kerangka Konseptual 2

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan penelitian mengenai hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan demikian, hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang dinyatakan dalam bentuk yang dapat diuji dan meramalkan suatu hubungan antara dua variabel (Ridhahani, 2020). Penelitian ini, akan mengemukakan beberapa hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya:

1. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kotaku di Kelurahan Panyingkiran diantaranya yaitu: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat, dan Partisipasi masyarakat dalam evaluasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat terhadap penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui Program Kotaku di Kelurahan Panyingkiran diantaranya yaitu:
Faktor internal: Pengetahuan dan kesadaran masyarakat, kemampuan dan keterampilan masyarakat. Faktor eksternal: Komunikasi dan Peran pemerintah, keterbukaan dan transparansi pemerintah, serta ketersediaan sumber dana.